

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) DI KELURAHAN PEMATANG REBA
KECAMATAN RENGAT BARAT
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Winda Amelia Vada

Email : windaamelia23@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Green Open Space (RTH) itself can be interpreted part of open spaces (open spaces) an urban area that is filled with plants and crops to support the direct or indirect benefits generated by RTH for safety, comfort, well-being, and the beauty of urban areas .RTH which drafted by the Department of Public Works in the Village Pematang Reba namely 1) the city park; 2) park along the road; 3) Playgrounds; and 4) recreational park.

From the research that the authors concluded that the implementation process of development in the Village Green Open Space District of Causeway Reba West Rengat Indragiri Hulu uses four stages: planning concepts are pretty good, but the concept of setting, implementation; and supervision has not been sufficiently well implemented, the government plays a role in the implementation process of development of green open space (RTH) in Kalurahan Pematang Reba District of West Regat Indragiri Hulu is the physical implementation delegated to the Department of Public Works in the field of Human Settlements, while the role of Local Government in the allocator budget, proposed, designed by the respective agencies appointed to carry out the activities carried out by the implementing activity Unit (SKPD).

keywords: Green Open Space (RTH), Government Management, Role of Government.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kota sebagai pusat dari usaha dan aktivitas manusia, yang merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya kunjung oleh masyarakat. Ketertarikan ini dapat membuat kota menjadi tempat yang tidak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Meningkatkan pembangunan kota berimbas kepada berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, parkir, dan tempat pedagang kaki lima. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan.

Dalam undang-undang otonomi daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pengolahan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun masalah dari lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaksediaan Ruang Terbuka Hijau, pencemaran udara dan air.

Ruang terbuka hijau sendiri dapat diartikan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanamanguna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau demi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam. Namun pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan, sehingga ruang terbuka hijau ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara maksimal.

Rengat, sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu, mencakup area seluas 571,75Km² dengan populasi mendekati 50.000 orang. Kota penting lainnya di Kabupaten ini adalah Pematang Reba, Air Molek, Seberida, Peranap dan Kelayang.

Tabel 1.1 :

Data Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Se-Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Ruang Terbuka Hijau
1	Rengat	2 Ha
2	Rengat Barat	20,4 Ha
3	Kuala Cenaku	1 Ha
4	Seberida	-
5	Batang Cenaku	-
6	Batang Gansal	-
7	Pasir Penyu	2,1 Ha
8	Lirik	-
9	Sungai Lala	-
10	Lubuk Batu Jaya	-
11	Kelayang	-
12	Rakit Kulim	-
13	Peranap	1 Ha
14	Batang Peranap	-

Sumber : Dinas PU Indragiri Hulu 2013-2014

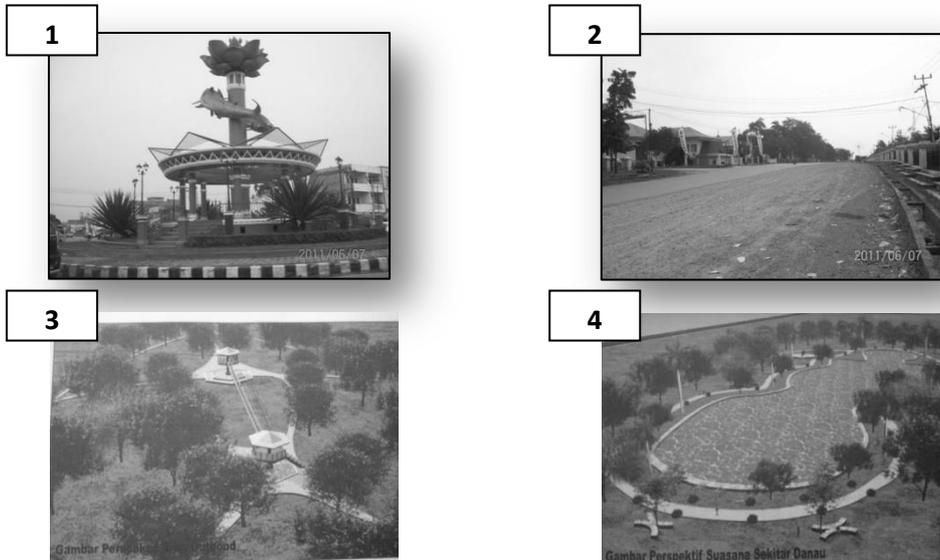
Dari tabel data luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013 memberi kejelasan bahwa luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah belum terlaksana semaksimal mungkin dapat dilihat dari empat tahap pelaksanaan pembangunan yang masih terkendala dalam konsep pembangunan awal dengan konsep pembangunan yang ada saat ini. Seperti pepohonan yang tidak terawat kesuburannya, *paving blocks* sudah banyak yang pecah, kebersihan sangat tidak memadai, serta tidak ada prasaranan umum seperti WC umum dan tempat pembuangan sampah di kawasan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Pematang Reba ini. Kebersihan dan struktur pembangunan ruang terbuka hijau ini dikatakan belum memadai dengan hasil data yang diterima di Dinas Pekerjaan Umum di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat

Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Masih banyak terlihat pekerjaan yang belum merata dikerjakan oleh dinas Pekerjaan Umum, dilihat dari fenomena dilapangan bahwa hasil pekerjaan pemerintah yang sangat minim.

Maka terdapat 4 (empat) jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikonsept oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kelurahan Pematang Reba sebagai berikut :

Gambar 1. 1:

4 Jenis Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat



1. Taman kota memiliki luas 0,02 Ha, dikawasan Perkotaan Pematang Reba. Taman ini telah dibangun pada tahun 2011 dikawasan perkotaan jalan Jendral Sudirman. Taman ini termasuk jenis Ruang Terbuka Hijau yang dikonsep oleh Pemerintah Pematang Reba.
2. Taman sepanjang jalan memiliki luas 13,68 Ha, sama halnya dengan taman kota, rancangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan merupakan rancangan pembangunan untuk renovasi.
3. Taman bermain memiliki luas 4,08 Ha, Ini rancangan pembangunan yang dikonsepkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2012 hingga saat ini
4. Taman rekreasi memiliki luas 7,64 Ha, sekitar danau merupakan rancangan pelaksanaan pembangunan. Adapun fenomena yang menarik dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan Kelurahan Pematang Reba yakni Peran Pemerintahan dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau tidak optimal dari segi pembangunannya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Heriasman salah satu Ketua Seksi Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kelurahan Pematang Reba menjelesakan bahwa lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikawasan perkantoran tidak strategis dan mendukung.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis membuat suatu batasan permasalahan yang hendak dibahas pada tulisan ini :

“Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?”

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian
untuk mengetahui “bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu?”.

b. Kegunaan Penelitian
Dalam melakukan setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, kemudian dapat digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu dan untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada. Adapun yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat Akademis,
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan berupa fenomena-fenomena yang terjadi di instansi pemerintah maupun dilingkungan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru.

b) Kegunaan praktis :
(1) Bagi pemerintah, memberikan informasi yang bermanfaat, yang

dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, terutama mengenai pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

(2) (2) Bagi masyarakat, dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga kebijakan pemerintah kota benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat.

(3) (3) Bagi Penulis, penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan dan dapat melihat dari dekat melalui sudut pandang akademis tentang masalah-masalah pemerintah, khususnya mengenai pembangunan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan.

KERANGKA TEORI

1. Manajemen Pemerintah

a. Pengertian Manajemen

Adapun beberapa para pakar mengartikan Manajemen dalam buku karangan Inu Kencana Syafie(2011: 1-2) sebagai berikut :

1. Menurut Frederick W.Taylor dalam bukunya yang berjudul *Scientific of Management* (1947) mengatakan bahwa “*The Art of Management is defined as knowing exactly what you want to do, and than seeing that they do it in best and cheapest way*”. Maksudnya manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang

sebenarnya akan anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.

2. Sedangkan menurut George Terry dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* (1964) mengatakan bahwa “*Management is distinct proces consisting of planning, organizing actuating and controlling performed to detemine and accomplish stated abjectives by the use of human being and other resources*”. Maksud manajemen disini adalah suatu proses khusus yang berdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

3. fungsi manajemen Pemerintahan Daerah (1) Perencanaan Pemerintahan Daerah, (2) Pengorganisasian kelembagaan Pemerintahan Daerah, (3) Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan daerah (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan), (4) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Inu Kencana Syafiie (2011) aspek manajemen Pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Perencanaan** : Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Secara umum aspek-aspek Menurut George R Terry (dalam Inu Kencana Syafiie, 2011:81-82) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintah yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

- 2) **Pelaksanaan** : Menurut George R Terry (dalam Inu Kencana Syafiie, 2011:81-82) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar

sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

- 3) **Pengawasan** : menurut Sondang Siagian bahwa pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimaksud pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan telah pemerintah, mengapa pemerintah berkuasa musti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan oleh karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.
- 4) **Kebijakan** : Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari tertinggi misalnya pemerintahan pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris.

b. Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999:52) menjelaskan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

pemerintah dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Fungsi pertama Pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor.

Menurut George R Terry (dalam Inu Kencana Syafie, 2011:81-82) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintahan yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan,

metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PEMBANGUNAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI
KELURAHAN PEMATANG REBA

A. Manajemen Pemerintah

Keterkaitan antara manajemen dan pemerintah adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintah atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legeslatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat

maupun yang berada pada tingkat daerah.

Dalam manajemen pemerintah itu sendiri, pemerintah berperan sebagai keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan pelaksanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau memberi hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1:

Hasil Observasi Peneliti tentang Proses dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba

No	Jenis Pertanyaan	Jawaban			
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Kurang
1	Dalam proses pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat empat konsep dalam pelaksanaannya		√		
	a. Perencanaan				
	b. Pelaksanaan			√	
	c. Pengawasan			√	
	d. Kebijakan			√	

Sumber : Observasi Lapangan, 2014

Berdasarkan hasil observasi dilapangan,peneliti mendeskripsikan mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

Dari hasil observasi tentang proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat empat konsep dalam pembangunannya yang menyatakan, pertama perlunya proses perencanaan. Proses perencanaan RTH disini dilakukan pada tahun 2011 dengan menggunakan anggaran APBN.

Kegiatan RTH ini dilakukan pada tahun 2012 sedangkan pengesahannya baru dilakukan pada tahun 2014 dengan hasil yang baik. Perencanaan pembangunan RTH di Kelurahan Pematang Reba sudah selesai, namun dalam pelaksanaannya yang bertahap sebanyak empat (4) tahap dimulai dari tahun 2012 sampai 2014. Namun kendala yang ditemukan yaitu rencana pola pemanfaatan ruang yang *design* selalu berubah-ubah, dikarenakan kondisi lapangan yang kurang kondusif dari perencanaan awalnya dan belum adanya konsep penataan Ruang Terbuka Hijau yang baik. Proses perencanaan pembangunan menggunakan anggaran APBD dan APBN yang dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2014 yang menelan biaya sebanyak 2,4 Milliar. Namun kenyataan yang didapatkan dalam proses pengaturan anggaran bahwa anggaran APBD putus kontrak

dengan alasan rencan tidak sesuai dengan rencana kerja awal sebanyak 1 miliar. Proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) disini dilakukan memulai proses lelang untuk menentukan rancangan dan kegiatan, yang mana dibentuk oleh konsultan pengawasan dan perencanaan serta Dinas Pekerja Umum itu sendiri. Namun kendala yang ditemukan dari hasil penelitian adalah kurangnya perhatian pemerintah, artinya pemerintah kurang mempertahankan pembangunan yang sehat karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini masih tahap pembangunan sehingga belum melakukan pengelolaan yang baik.

Hasil observasi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba disini dapat disimpulkan peran pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau adalah dalam pelaksanaan fisik yang berperan dilimpahkan pada Dinas Pekerjaan Umum pada bidang Cipta Karya, sedangkan Pemerintah Daerah berperan dalam pengalokasi anggaran APBD, mengajukan, merancang berdasarkan instansi masing-masing yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan yang final dengan Satuan Kegiatan Pelaksana Daerah (SKPD), dan yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau disini adalah Bupati, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pada dasarnya hubungan yang erat antara Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait perlu hubungan loyalitas agar tiap

rencana kegiatan yang dilakukan oleh tiap dinas dapat terwujud kerjasama yang baik dan harapannya pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik dalam daerah maupun luar daerah.

fenomena Ruang Terbuka Hijau ini belum terlaksana baik dari segi pelaksanaan dan pembangunan hingga saat sekarang, bermunculan wacana tentang banyak sarana dan prasarana yang ada di RTH Pematang Reba ini yang sudah mengalami kerusakan seperti kurang tersedianya fasilitas penunjang di dalam kawasan seperti tidak adanya fasilitas bangku taman, banyaknya lampu taman yang sudah berpecahan dari segi fasilitas penerangan, sampah berserakan menjadi polemik tentang peran Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pelaksanaan dan pembangunanyang tidak optimal dari segi pekerjaan pemerintah itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dalam proses pembangunannya dilakukan dengan empat konsep yaitu:

- a. Perencanaan yaitu proses perencanaan dilakukan pada tahun 2011 dengan menggunakan anggaran APBN. Kegiatan RTH ini dilakukan pada tahun 2012 sedangkan pengesahannya baru dilakukan pada tahun 2014. Dalam perencanaan pembangunan RTH di Kelurahan

Pematang Reba sudah selesai namun dalam pembangunannya yang bertahap sebanyak empat (4) tahap.

- b. Pembangunan RTH disini, dilakukan memulai proses lelang untuk menentukan rancangan dan kegiatan, yang mana dibentuk oleh konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri.
- c. Pengawasan Ruang Terbuka Hijau disini secara fisik *diawasi dan dibantu oleh konsultan pengawas dan PTK (Pengawas Teknis Kegiatan) dari Dinas Pekerjaan Umum* dan belum ada ada pengawasan khusus yang tinjau oleh Bupati dikarenakan proses pembangunan masih dinilai berjalan 30-40% dalam pembangunannya.
- d. Proses kebijakan Ruang Terbuka Hijau disini Bupati memberi kebijakan kepada BAPPEDA untuk menunjuk Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki kegiatan serta mengerjakan proyek fisik Ruang Terbuka Hijau, dan Dinas Pekerjaan Umum akan mengalokasikannya ke kecamatan-kecamatan yang terkait serta menunjuk konsultan dengan cara melelang proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Tetap saja Dinas Pekerjaan Umum memiliki kebijakan mengawasi dan mengontrol pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Pematang Reba dan jenis kebijakan yang digunakan oleh pihak-pihak instansi yang terkait.

B. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah Daerah Pematang Reba lebih efisien lagi dalam proses pembangunan RTH yang telah berjalan selama empat tahun lamanya agar terlihat tujuan dari rancangan pembangunan yang dituju.
- b. Bagi instansi yang terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum, lebih mematangkanlah konsep kinerja pembangunan RTH ini, baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana pembangunan RTH di Pematang Reba.
- c. Harus adanya pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Menteri Kehutanan. Sehingga agar tidak menyulitkan Pemerintah Daerah dalam penetapan Perda dan RTRW dalam proses kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini.

DAFTAS PUSTAKA

- Hamdi, 1999. *Strategi dan Peran dalam Pembangunan*. Jakarta : Reka Cipta
- Ibrahim, Amin. 2001a. *Otonomi Daerah (OTDA) dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Bandung : Pasca Sarjana UNPAD
- Nazir, Moh.2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dwijowijoto Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan*

- Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Osborne, David & Ted Gaebler. 1997. *Mewira Usahakan Birokrasi*, (terj). Jakarta : Pustaka Pressindo
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Subarsono.2009. *Analisi Kebijakan Publik*. Cet. Ke IVYogyakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.1987. *Administrasi Pembangunan*. Cet. Ke-16, Jakarta : Gunung Agung
- Suryadinata.1998. *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung : Mandar Maju
- Terry, George. 1964. *Principles of Management*. Jakarta : Raja Wali
- Usman,Husaini. 2008. *Manajemen* Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publisng
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Dokumentasi

- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta : Menteri Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002

- tentang *Hutan Kota*. Jakarta :
Menteri Kehutanan
- Undang-undang otonomi daerah No. 32
Tahun 2004 tentang *Pemerintahan
Daerah*. Jakarta : Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Jakarta :
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang *Penataan Ruang*

Jurnal

- Chyntia D Putri, Lely Indah Mindarti.
2011. *Peran Pemerintah Daerah
dalam Mengelola Ruang Terbuka
Hijau dengan Perspektif Good
Environmental Governance (Study
di Kota Madiun)*. Universitas
Brawijaya, Malang
- Intan Muning, 2008. *Karakteristik ruang
terbuka hijau di kawasan
permukiman Kelurahan Tandang
Kecamatan Tembalang Kota
Semarang*. Universitas Semarang